

MEMAKNAI KEMBALI KETAHANAN PANGAN

Armaidy Armawi*)

Kemampuan pertanian Indonesia belum cukup menggem-birakan karena masih terdapat ketergantungan pada pangan impor, sehingga tanpa perbaikan sistem yang menyeluruh maka pasar pangan Indonesia akan diincar oleh produsen luar negeri. Upaya membangun kemandirian pangan bagi Indonesia sangat sulit dan pasti akan mendapat tantangan dari banyak produsen pangan luar negeri. Hal ini disebabkan apabila Indonesia mandiri di bidang pangan, maka akan hilanglah pasar yang besar bagi produk pangan negara-negara eksportir. Indonesia telah lama dikenal sebagai negara agraris (mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani); ironisnya justru merupakan salah satu negara pengimpor beras yang cukup besar di dunia yaitu 2 juta ton/th, impor gula 1,6 juta ton/th nomor 2 terbesar di dunia, impor kedelai 1,1 juta ton/th, impor gandum 4,5 juta ton/th, impor jagung 1,2 juta ton/th, impor ternak sapi 450.000 ekor/th. Data tersebut memperlihatkan betapa besarnya pangsa pasar pangan Indonesia, sehingga kondisi yang demikian akan menjadi incaran dan peluang pasar bagi produsen pangan dunia (Yudo Husodo, 2003).

Produksi pangan pokok penduduk yaitu beras pada periode 1998-2001 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode 1995-1997, sehingga volume impor beras meningkat dari 1,5 juta ton/th pada periode 1995-1997 menjadi 3,2 juta ton/th pada periode 1998-2001. Secara drastis, ratio impor beras

Indonesia terhadap volume perdagangan dunia naik dari 3,8% pada periode 1995-1997 menjadi 12,8% pada periode 1998-2001. Oleh karena itu, tingkat ketergantungan Indonesia dari impor produk pangan meningkat dari 4,3% pertahun pada periode 1995-1997 menjadi 9,1% pertahun pada periode 1998-

*) Drs. Armaidy Armawi, Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.

2001. Kenyataan ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat keamanan pangan yang tidak begitu menggembirakan. Hal ini disebabkan karena ketergantungan Indonesia pada pasokan bahan pangan dari luar negeri yang cukup substansial (Yudo Husodo, 2003).

Lembaga pangan internasional, yaitu FAO, memprediksikan bahwa laju peningkatan produksi pangan ke depan lebih besar dari pertambahan penduduk. Dalam kurun waktu 30 tahun mendatang jumlah penduduk dunia akan mencapai 8 milyar, dan mayoritas penduduk akan tinggal di negara berkembang dan negara miskin. Oleh karena itu, penduduk negara-negara berkembang akan mengalami ketergantungan pangannya pada impor pangan yang semakin besar, sementara ekspor pangan negara maju akan melonjak dari 142 juta ton pada tahun 1995 menjadi 280 juta ton pada tahun 2030 (Yudo Husodo, 2003).

Memahami Makna Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling hakiki untuk bertahan hidup dalam rangka eksistensinya. Oleh karena itu, ketersediaan bahan pangan sangat perlu di daerah-daerah permukiman

dalam jumlah yang cukup, mempunyai mutu yang layak dan secara medis aman untuk dikonsumsi. Di samping faktor-faktor tersebut, secara ekonomis persoalan pangan terkait juga dengan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga harga produk pangan harus dapat terjangkau oleh penduduk atau konsumennya. Harga pangan yang terjangkau tidak berarti harus rendah dan murah, karena kebijakan yang demikian justru menimbulkan banyak kerugian pada petani dan kemampuan ketahanan pangan nasional. Harga pangan juga harus dapat memberikan keuntungan bagi petani sehingga memberikan insentif untuk meningkatkan produksi. Dengan demikian, pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia yang pemenuhannya tidak dapat ditunda-tunda.

Perlu diketahui bahwa definisi pangan menurut Suharjo (1986) adalah bahan-bahan yang dimakan sehari-hari oleh individu manusia untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja dan penggantian jaringan tubuh yang rusak. Oleh sebab itu, pembangunan pertanian dalam upaya peningkatan produksi pangan selalu menjadi prioritas pembangunan di hampir setiap negara. Salah satu tujuan dari pem-

bangunan pertanian adalah menjaga agar ketahanan pangan tetap terkendali. Ketahanan pangan menurut Pabinru dan Saliem (1993) didefinisikan sebagai kemampuan individu/kelompok individu untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap saat dan waktu sesuai dengan syarat kebutuhan untuk dapat hidup secara sehat, normal dan bekerja dengan baik. Pengertian tersebut selain mengandung pengertian kuantitas juga menekankan adanya jaminan pasokan setiap waktu.

Selain itu, pendekatan berbeda dalam mendefinisikan ketahanan pangan dapat ditinjau dari kemampuan akses masyarakat dalam memperoleh pangan yang dibutuhkan. Pendekatan yang demikian disebut sebagai pendekatan kepemilikan (*entitlement*) (Pakpahan 1992). Bank Dunia mendefinisikan ketahanan pangan sebagai jaminan akses bagi setiap orang pada setiap waktu untuk memperoleh pangan yang cukup bagi kehidupan yang aktif dan sehat. Kemudian, menurut Zaenal Bachruddin, Ketahanan pangan berarti kecukupan pangan bagi setiap penduduk dari waktu ke waktu, dengan kapasitas volume, nilai gizi dan kualitas pangan yang memadai untuk kebutuhan hidup. Ketahanan pangan ini tidak dapat dihindari (*conditio*

sine qua non), sebab merupakan tuntutan semua penduduk dunia.

Di sisi lain, Riely et al. (1995) dalam Hodinott (1999) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai "*access for all people at all times to enough food for an active, healthy life*". Dalam pengertian ini, maka kata kunci yang paling penting dari ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan sepanjang waktu, artinya mengacu pada konteks ketersediaan pangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengetahuan yang mencukupi dan memadai untuk dapat mengidentifikasi pola produksi pangan menurut waktu di suatu kawasan atau sistem komunitas dan sifat keamanan/keterjaminan pangan serta persoalan pemenuhan kebutuhan gizi pangan (*the nature of the food security and the nutrition problem*) yang dihadapinya.

Maxwell dan Frankenberger (1992) mengungkapkan pandangan yang agak berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu memberikan pengertian ketahanan pangan dengan menggunakan tolok ukur *dimensi spasial* dan *temporal* sebagai faktor pembeda ketahanan pangan dalam suatu masyarakat. Berangkat dari kedua faktor pembeda ini, mereka kemudian memberikan dua situasi kerawanan pangan yang khas. Kedua situa-

si tersebut yaitu: (1) *chronic food insecurity* (kerawanan pangan kronis) – *the inability to meet food needs on an ongoing basis*, dan (2) *transitory food insecurity* (kerawanan pangan sementara) – *when the inability to meet food needs is temporary*. Pada kategori rawan pangan yang sementara, ketegaran ketahanan pangan suatu masyarakat dapat dibagi ke dalam dua sub-kategori, yaitu kerawanan secara siklikal (*cyclical – where there is a regular pattern of food insecurity*) dan kerawanan pangan secara temporer (*temporary food insecurity as a result of natural disaster such as drought or floods*). Dalam kaitannya dengan kedua situasi kerawanan pangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Maxwell dan Frankenberger, maka yang paling sering terjadi di Indonesia, khususnya di kawasan ekologis terancam (*ecologically vulnerable*), adalah bencana kelaparan (*food insufficiency and food insecurity*) yang berulang secara periodik. Kajian terhadap ketahanan pangan dengan ciri *seasonality* yang tinggi seperti ini telah banyak dilakukan, yaitu pada aras *meso regional* di masyarakat kawasan, seperti di daerah Gunung Kidul daerah selatan Jawa Tengah, ataupun di daerah kering pada berbagai kawasan di Nusa Tenggara Timur (Sajogyo et al, 1993). Kerawanan pangan

dalam hal ini terkait erat dengan persoalan kemiskinan dan keterbelakangan (*poverty and underdevelopment*) penduduk.

Ketahanan pangan juga dimaknai sebagai: “*adequate access to food all times throughout the year and from year to year*” (Hodinnott, 1999). Dengan mengikuti pengertian ini, maka kata kunci terpenting dalam hal ini yaitu besar-kecilnya akses yang bisa di dapat pada pangan. Dengan demikian, pola penguasaan sumberdaya ekonomi dan sosial yang menopang keterjaminan pangan menjadi isu terpenting dalam masyarakat. Artinya, apabila akses terhadap pangan telah dikuasai dan terdistribusi secara merata dalam masyarakat, maka setiap lapisan masyarakat dan rumah tangga akan memiliki sumberdaya yang mencukupi (*sufficient resources*) untuk mendapatkan pangan yang memadai bagi kesehatan (*appropriate foods for a nutritious diet*). Berpang-gahan dengan makna dan pandangan ketahanan pangan dalam perspektif ini, maka persoalan mengenai bagaimana pangan dan sumber pangan dialokasikan menjadi sesuatu hal yang cukup penting untuk diketahui. Oleh karena itu, permasalahan penguasaan akses terhadap tanah (*access to land*) dan tipe serta struktur sumberdaya agraria (*agrarian resources*) men-

jadi suatu hal yang penting dalam hal ini (De Janvry et al., 2001).

Penguatan Kelembagaan

Dalam upaya mengantisipasi prediksi FAO tersebut maka Indonesia perlu untuk mewaspadainya agar tidak terperangkap pada tingkat kondisi harga internasional. Oleh karena itu, perhatian pemerintah hendaknya senantiasa diarahkan kepada upaya-upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan pangan (*food dependency*) terhadap negara luar. Sejalan dengan itu, harus diusahakan untuk menanggulangi kerawanan pangan (*food vulnerability*) dan memperkuat posisi ketahanan pangan nasional (*food security*). Kondisi produk pertanian rendah yang dipadukan dengan kebijakan makro ekonomi dalam negeri yang menekan harga produk pertanian ke tingkat terendah akan berakibat terjadinya disinsentif bagi perkembangan pertanian. Dengan demikian, kondisi semacam itu akan menurunkan gairah dan motivasi petani untuk berupaya meningkatkan dan memperluas usahanya. Kemudian, di tengah produksi nasional yang menurun dan permintaan yang terus naik akan menyebabkan impor terus meningkat. Oleh karena itu, tidak terlalu berlebihan apabila

upaya memperkuat ketahanan pangan dan usaha untuk mengembalikan kondisi Indonesia pada posisi *self-sufficiency* sebagaimana yang pernah dicapai oleh bangsa Indonesia pada tahun 1983 menjadi penting untuk diwujudkan kembali.

Populasi penduduk Indonesia yang besar, merupakan tantangan bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan yang memadai serta terjangkau oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rendah sekalipun. Permasalahan pangan dewasa ini semakin kompleks karena menyangkut keamanan, kesehatan, keselamatan, serta kehalalan bagi konsumen. Dengan mengacu kepada komitmen internasional yang pernah dideklarasikan WHO, maka terdapat tiga pilar utama yang sangat berperan dalam mewujudkan suatu bentuk ketahanan pangan, yaitu pemerintah, konsumen dan industri/pelaku usaha. Para pelaku usaha ini meliputi produsen bahan baku sampai dengan industri pengolahannya. Untuk menjaga ketahanan pangan dan meringankan beban masyarakat tersebut, haruslah senantiasa tersedia pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka bidang pertanian merupakan bidang yang sangat berkepentingan dengan hal itu.

Konsep ruang (*spasial*) dalam ketahanan pangan memberikan pegangan bagi kebijakan pangan untuk dapat memilih dan memilah ruang intervensi dan telaah masalah kerawanan pangan. Secara teoritis, terdapat beragam level (aras) agregasi (*degree of aggregation*) bagi analisis ketahanan pangan suatu masyarakat, yaitu: (1) aras global - ketika ketahanan pangan dunia diperbincangkan, (2) aras kontinental atau benua - sebagaimana Afrika yang saat ini sangat serius menghadapi kekurangan pangan secara dramatis, (3) aras nasional - ketahanan pangan suatu negara, (4) aras meso-regional - seperti kawasan kluster di suatu Daerah Aliran Sungai, Kabupaten atau Provinsi tertentu, (5) aras desa atau kesatuan komunitas tertentu, (6) aras rumah tangga, dan terakhir (7) aras individual. Pada setiap level, analisis ketahanan pangan boleh jadi akan berangkat dari asumsi berbeda dan akhirnya pun memberikan solusi pemecahan masalah ketahanan/kerawanan pangan yang berbeda-beda pula.

Kelembagaan penopang ketahanan pangan di tingkat (aras) meso-regional, bisa ditelaah dari dua sub-aras yang berbeda. Kedua aras tersebut yaitu supra-lokal dan komunitas lokal. Pada aras *supra lokal*, ketahanan pangan dikembangkan dengan

sistem kelembagaan kolaboratif antarpihak yang mencakup tiga komponen masyarakat yang terpenting. Ketiga unsur masyarakat tersebut yaitu: (a) negara - sebagai aktor dan sekaligus regulator pembangunan, (b) pasar atau sektor swasta - sebagai pelaku bisnis dan penggerak sistem perekonomian regional, (c) *civil-society* - sebagai masyarakat sipil yang diwakili oleh berbagai jenis organisasi dan asosiasi kemasyarakatan.

Selanjutnya, aras berikutnya yaitu pada aras komunitas-lokal yang ada pada ruang masyarakat sipil. Di sini inisiatif-inisiatif yang bersifat lokalistik untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan yang mandiri dapat didorong dan dikembangkan. Ideologi pemberdayaan dalam perspektif pembangunan partisipatif berbasiskan *grass-root (popular-based development)*, dapat digunakan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan pada tingkat lokal. Dengan demikian, pemberdayaan sistem ketahanan pangan pada aras komunitas lokal ini akan berdampak ganda, yaitu akan terjadi pengurangan ketergantungan terhadap agensi dari luar dan sekaligus membangun suatu bentuk sistem kemandirian ketahanan pangan setempat (*self-reliance food supply system*).

Pada aras lokal ini, sudah se-

jak lama sejarah sistem ekonomi produksi tradisional telah menemukan adanya suatu bentuk sistem ketahanan pangan asli (*indigenous food security institutions*), yang cukup beragam di Nusantara. Seperti di Jawa Tengah, misalnya, konsep lumbung padi yang menghimpun kelebihan hasil panen setiap rumah tangga petani untuk mengantisipasi kelangkaan pangan di musim paceklik merupakan asset kelembagaan yang tak ternilai harganya. Namun demikian, perubahan sosial di pedesaan yang berlangsung secara dramatis selama lima puluh tahun terakhir telah menggerus eksistensi kelembagaan lokal ini dan menggantikannya dengan sistem-sistem pengadaan pangan berbasis ekonomi-transaksional yang sangat tergantung pada *fluktuasi supply* dan *demand* pasar pangan yang rawan dengan pengaruh eksternal itu.

Tidak berlebihan kiranya jika mekanisme antisipasi kerawanan pangan model lumbung padi atau modifikasi dari model lumbung padi dapat dikembangkan lagi di berbagai kawasan. Permasalahannya yaitu ada sejumlah persyaratan dan asumsi seperti sistem pelapisan sosial, sistem nilai ekonomi, dan struktur ekonomi yang perlu dikaji ulang untuk perekayasannya. Dengan berubahnya struktur so-

sial dan orientasi nilai budaya masyarakat desa ke arah sistem ekonomi yang *profit-oriented* dan semakin kapitalistik, maka sulit rasanya mengembangkan kelembagaan-kelembagaan berbasis kolektivitas dan solidaritas sosial yang tinggi. Namun demikian, upaya ke arah pembentukan kelembagaan semacam lumbung padi dapat tetap memberikan harapan, selama ada kemauan ke arah tersebut. Adapun kata kunci terpenting di sini adalah bahwa ke depan, kelembagaan ketahanan pangan lokal seyogyanya harus dikembangkan berdasarkan potensi modal sosial (*trust, norms, dan social networking*) yang selama ini telah terbentuk di tingkat *grass-root/* lokal. Sementara kelembagaan ekonomi yang ada dapat menjadi pelengkap yang menopang sistem ketahanan pangan lokal dan lebih banyak bekerja pada tingkat meso-regional serta nasional.

Salah satu pendekatan yang perlu dipikirkan dalam kerangka besar desain penguatan ketahanan pangan nasional (*national grand design for food security strengthening*) adalah strategi penguatan kelembagaan (*institutional strengthening strategy*) dan pengembangan kelembagaan (*institutional development strategy*) sebagai penopang ketahanan pangan. Dengan semangat de-

sentralisasi, ketahanan pangan dapat diupayakan melalui penguatan dan memberdayakan infrastruktur kelembagaan pemerintahan (*governmental institution empowerment*) dalam pencapaian program ketahanan pangan (*food security program*). Swasta dan masyarakat umum juga merupakan komponen yang seharusnya ikut berpartisipasi secara aktif dalam program ini.

Terwujudnya suatu ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga. Dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang ditindak lanjuti dengan terbentuknya PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. PP No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan mengamanatkan kepada Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk bertanggungjawab dalam menyelenggarakan ketahanan pangan di daerah masing-masing dengan memperhatikan ketentuan dari Pemerintah Pusat. Mengingat kompleksnya unsur-unsur yang berperan dalam persoalan ketahanan pa-

ngan, yaitu mencakup lintas sektor/sub sektor teknis maupun non teknis, lintas institusi dan non pemerintah, lintas pelaku (produsen, industri pengelola, distributor dan konsumen), maka diperlukan lembaga/unit kerja khusus agar terjadi kesinambungan, keselarasan dan sinergi dalam berbagai upaya yang dilakukan oleh berbagai unsur tersebut.

Perkembangan kondisi kelembagaan yang menangani masalah pangan di daerah cukup beragam, dan hal ini memang tidak bisa disalahkan karena sejalan dengan arah dari otonomi daerah. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah kinerja instansi/lembaga tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga besar atau kecilnya tingkat lembaga ini akan mewarnai kinerja instansi yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan peran strategis institusi ketahanan pangan sebagai alat pemersatu bangsa. Setiap daerah akan unggul di bidang pangan apabila daerah tersebut mempunyai konsep yang tepat dalam mengelola daerahnya berdasarkan 4 faktor, yaitu: (a) faktor sumberdaya alam berperan 10%, (b) faktor teknologi berperan sebesar 20%, (c) faktor jaringan kerja (*net working*) berperan sebesar 25% dan (d) faktor inovasi dan kreativitas, berperan sebesar

45%. Khusus untuk faktor jaringan kerja (*net working*), yaitu kerjasama antar daerah, interdependensi, interkoneksi serta inovasi dan kreatifitas dari masyarakat memegang peran 70% bagi keunggulan suatu daerah. Hal inilah yang merupakan jiwa dan semangat otonomi daerah.

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pola pembagian kewenangan antar satuan pemerintahan akan berdampak dan terkait kepada pola organisasi serta pola hubungan kerja antar satuan pemerintahan di samping sub sistem lainnya. Pola pembagian kewenangan diatur dengan membatasi kewenangan pemerintah pusat dan propinsi sebagai daerah otonom seperti yang diatur dalam pasal 7 dan pasal 9 serta PP No. 25 Tahun 2000, sedangkan kewenangan selebihnya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota seperti diatur pada Pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999. Hal ini akan berpengaruh pada kemampuan dan kemandirian daerah, khususnya dalam mengelola pangan di daerah sesuai dengan keunggulan daerah tersebut yang dijabarkan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan kondisi daerah lain sehingga ada korelasi antardaerah.

Dalam siklus pembangunan

di daerah, suatu perencanaan antardaerah sangat dibutuhkan sekali dan harus mampu memecahkan masalah-masalah alokasi tugas dan sarana antardaerah dan antarmasyarakat daerah agar tidak tergelincir pada daerahisme dan integralisme sempit. Hal ini membutuhkan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: Pertama, menekankan perencanaan antardaerah sebagai bagian utama yang konsistensinya harus dijaga agar tidak jatuh pada persaingan yang tidak sehat antar daerah. Dalam pendekatan ini yang ditekankan adalah kepentingan hubungan antar daerah dan bukan kepentingan suatu daerah. Kedua, menekankan pentingnya dimensi daerah sebagai salah satu kriteria penting dari seluruh skema perencanaan, pertimbangan hubungan antar daerah dan kepentingan dari seluruh skema perencanaan. Pertimbangan hubungan antar daerah dan kepentingan suatu daerah akan memberi warna dalam menentukan pilihan urgensi dalam skema perencanaan pembangunan nasional yang didasarkan kepada heterogenitas potensi pangan dan nilai budaya masyarakat daerah.

Penutup

Berdasarkan butir-butir di atas dan sejalan dengan makna

dari PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan langkah-langkah sinergis dari lembaga/instansi yang dikemas dalam Pemberdayaan Kelembagaan Kabupaten/Kota dalam suatu bentuk sistem manajemen ketahanan pangan. Hal ini disebabkan karena kerawanan pangan ini akan berpengaruh pada ketahanan nasional. Menurut konsepsi ketahanan nasional, dalam usaha untuk mengidentifikasi isi, wadah, dan tatalaku dari ketahanan nasional harus menggunakan metode "menggali diri sendiri", yang artinya mendalami dan menyelami keadaan seluruh tumpah darah Indonesia dan pengalaman segenap bangsa Indonesia diwaktu lampau guna dipadukan dengan situasi dan kondisi sekarang untuk mencapai cita-cita di hari depan. Penerapan metode tersebut menghasilkan temuan bahwa unsur alamiah tumpah darah Indonesia adalah letak kedudukan (posisi) Indonesia, keadaan dan kekayaan alam Indonesia, serta keadaan dan kemampuan penduduk Indonesia.

Apabila disandingkan dengan 9 (sembilan) elemen konstitutif dari *national power* yang dikemukakan oleh Morgenthau, ketiga gatra alamiah yang diidentifikasi dalam konsepsi ke-

tahanan nasional tersebut hampir sama; setidaknya berpadanan dengan hasil analisis Morgenthau yang pada intinya ingin menjelaskan posisi, kekayaan alam dan keadaan / kemampuan penduduk. Hal ini merupakan potensi dasar bagi pengembangan ketahanan pangan. Gatra sosial dalam konsepsi ketahanan nasional mengidentifikasi adanya lima pola kegiatan kehidupan yang saling terkait dan secara nyata dijalani oleh masyarakat, yaitu: terselenggaranya kebersamaan hidup yang adil, terpeliharanya persatuan, tercukupinya "sandang-pangan-papan", terpeliharanya ketata-tenteraman, dan kesepakatan antar segenap warga masyarakat.

Daftar Pustaka

- Besar, Abdulkadir, 2002, *Redefinisi Pengertian Ketahanan Nasional (Suatu Usulan Konstruktif)*, Universitas Pancasila, Jakarta.
- De Janvry, A. Et.al. 2001. *Access to Land, Rural Poverty, and Public Action*. Oxford University Press. Oxford, UK.
- Hodinott, J. 1999. *Operationalizing Household Food Security in Developing Projects: An Introduction*. IFPRI. Washington D.C.

- Maxwell, S and Frankenberger, T. 1992. *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements*. IFAD. Rome
- Morgenthau, Hans J, 1990, *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Pabinru, Muin dan Hendewi P. Saliem, 1993, "Kecukupan dan Ketahanan Pangan", dalam *Prisma* No. 3 Tahun XII, Jakarta.
- Pakpahan, A dan Effendi Pasandaran, 1990, "Keamanan Pangan: Tantangan dan Peluangnya", dalam *Prisma* No.2 Tahun XIX, Jakarta.
- Sajogyo, et al. 1993, *Kemiskinan dan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Siswono Yudo Husodo. 2003. "Butir-butir Pemikiran" disampaikan pada *Hari Pangan Nasional si Dunia ke XXIII*, 24 Oktober 2003.
- Subandriyo, T. 2003. Gerakan Memerangi Kelaparan. Opini Pembaca pada *Harian Suara Merdeka*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0310/13/kha1>.